



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN

JALAN RAYA PEMBANGUNAN GUNUNGSINDUR, BOGOR 16340
TELEPON (021) 7560466, 7560489 FAKSIMILI (021) 7560466
E-mail : bbpmsoh@pertanian.go.id Website : <https://bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id>

Nomor : 10003/Kp.430/F.4.B/3/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Laporan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi ASN

10 Maret 2026

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan
di
Jakarta

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B-611/KU.020/A/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 hal Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi ASN lingkup Kementerian Pertanian, bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara di Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur telah melaporkan Harta Kekayaan Aparatur Negara baik berupa Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Tahun 2025. Rekapitulasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunungsindur kami sertakan dalam lampiran surat ini.

Atas Perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Balai Besar,

drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Tembusan:
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Obat Hewan Berkualitas, Masyarakat Aman dan Cerdas



Lampiran Surat :

Nomor : 10003/Kp.430/F.4.B/3/2026
Sifat : Biasa
Tanggal : 10 Maret 2026
Hal : Laporan Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi ASN

**REKAPITULASI PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN)
TAHUN 2025**

Unit Kerja : Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah seluruh Aparatur Negara	82
	a. Wajib LHKPN	6
	b. Tidak Wajib LHKPN	76
2	Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	6
3	Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	-
4	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT	76
5	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT	-
6	Jumlah Aparatur Negara yang belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKPN dan SPT Tahunan)	-



Kepala Balai Besar,

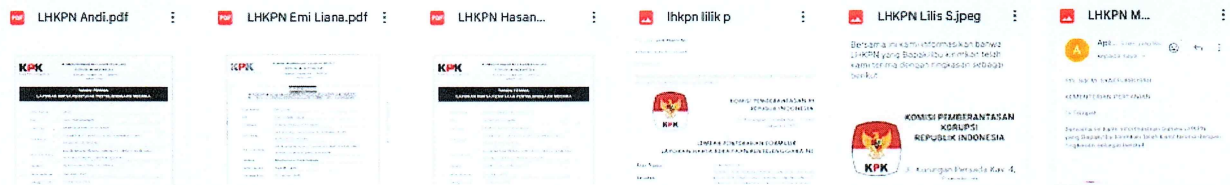
drh. Hasan Abdullah Sanyata
NIP. 197001102002121001

Lampiran

... > 2026 > LHKPN 2025 ▾ 🔍

Jenis ▾ Orang ▾ Dimodifikasi ▾ Sumber ▾

Nama ↑



... > 2026 > Screenshoot Bukti Lapo... ▾ 🔍

Jenis ▾ Orang ▾ Dimodifikasi ▾ Sumber ▾

Nama ↑

